

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SMA NEGERI 4 SINGARAJA

Dewa Nyoman Redana¹ dan I Nyoman Suprpta²

ABSTRAKSI

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Adapun tujuan dari kurikulum merdeka belajar adalah mengembalikan otoritas sekolah dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya.

Beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah Implementasi Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja ?; 2) apakah faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja dipengaruhi oleh empat variabel yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adanya keempat faktor tersebut menyebabkan kurikulum merdeka dapat diimplementasikan dengan baik di SMA Negeri 4 Singaraja.

Adapun faktor pendukung dari implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja adalah tersedianya sumber daya yang cukup memadai untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Juga karena isi dari kurikulum tersebut cukup mudah untuk dipahami. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah masih minimnya kemampuan implementor dalam hal ini masih banyaknya guru-guru di SMA Negeri 4 Singaraja yang belum memahami isi dari kurikulum merdeka sehingga mereka agak sulit untuk melaksanakannya dalam proses pembelajaran.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kurikulum, Kurikulum Merdeka

¹ Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email dewa.redana@unipas.ac.id

² Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email nym.suprpta@unipas.ac.id

1. Pendahuluan

Upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia didukung oleh pemerintah melalui tujuan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mengutamakan pencapaian dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sistem pendidikan juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, dan sikap saling menghargai jasa para pahlawan serta berkeinginan untuk maju. Hal tersebut sengaja dirumuskan agar memberikan suasana kebatinan dan semangat serta motivasi bagi setiap elemen bangsa yang terkait untuk terus berusaha mencapai cita-cita yang mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Sudirman, 2004).

Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup, proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal (Ihsan, 2016 : 4). Lebih jauh dijelaskan oleh Ihsan (2016 : 110) bahwa ”pendidikan merupakan suatu sistem bercirikan memiliki tujuan atau sasaran pendidikan dan berfungsinya komponen-komponen pendidikan seperti peserta didik, pendidik, kurikulum, tujuan pendidikan, peralatan atau fasilitas, dan lain-lain”.

Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan memegang peranan yang sangat penting demi tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 19, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya seperti yang diatur dalam pasal 36 ayat 2, kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kemudian menurut Trump dan Miller sebagaimana dikutip Anshari (2014) menyatakan kurikulum juga termasuk metode mengajar dan belajar, cara mengevaluasi murid dan seluruh program, perubahan tenaga pengajar, bimbingan dan penyuluhan, *supervisi* dan administrasi dan hal-hal struktural mengenai waktu, jumlah ruangan serta kemungkinan memilih mata pelajaran.

Pengertian kurikulum senantiasa berkembang terus sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Ibrahim (dalam Ruhimat, 2014 : 6)

mengelompokkan kurikulum menjadi tiga dimensi, yakni kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai substansi memandang kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum dapat juga menunjuk pada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara penyusun kurikulum dan pemegang kebijakan pendidikan dan masyarakat.

Sejak pemerintahan Orde Baru, berbagai macam kurikulum pernah ditetapkan dan dilaksanakan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Diantaranya Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K-13, dan yang sekarang telah ditetapkan dan akan mulai dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2022/2023 yakni Kurikulum Merdeka atau Kurikulum Pancasila.

Oleh karena kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada daerah dan peserta didik, maka pengembangan Kurikulum Merdeka yang memberikan kebebasan kepada peserta didik tetap mengacu pada standar pendidikan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan penilaian pendidikan (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2010)

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Adapun tujuan dari kurikulum merdeka belajar adalah mengembalikan otoritas sekolah dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya. Mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Menyiapkan tantangan global era revolusi 4.0. (Kemendikbudristek, 2022)

Implementasi kurikulum merdeka menuntut satuan pendidikan di setiap jenjang sekolah memberikan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan belajar. Pada prinsipnya, kurikulum merdeka menuntut satuan pendidikan di sekolah memberi fasilitas penuh agar kurikulum merdeka ini bisa diimplementasikan

dengan baik. Adapun ciri khas dari Kurikulum Merdeka Belajar adalah : 1) Berbasis Proyek dan Karakter ; 2) Fokus pada Materi Esensial ; dan 3) Fleksibilitas bagi Guru dan Siswa.

Apapun jenis dan nama kurikulum yang digunakan dalam proses pendidikan, pada akhirnya semua bertujuan untuk pencapaian tujuan pendidikan dalam arti luas dan peningkatan prestasi belajar siswa. Akan tetapi berbagai kendala sering dihadapi oleh para pelaku pendidikan karena kebijakan pemerintah tentang kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan sering berubah-ubah seiring pergantian pejabat. Para guru sebagai tenaga pendidikan sering mengalami masalah dalam penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena satu kurikulum belum benar-benar dipahami dan diterapkan dengan baik, sudah muncul kebijakan baru tentang perubahan kurikulum. Bahkan permasalahan yang sudah mulai muncul khususnya di SMA Negeri 4 Singaraja, adalah adanya beberapa orang guru yang tidak mau mengajar di Kelas X Tahun Ajaran 2022/2023, karena Kurikulum Merdeka akan diterapkan dan dilaksanakan pada siswa Kelas X Tahun Ajaran 2022/2023.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ” Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Singaraja ”

Bertolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja ?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja ?

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilaksanakan, jenis atau metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Dalam penelitian yang dilaksanakan, maka informan yang dipandang mampu memberikan informasi yang akurat antara lain: Kepala SMA Negeri 4 Singaraja,

Wakil Kepala Sekolah dan para guru dan siswa di SMA Negeri 4 Singaraja. Informan dipilih secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono,2013:219)

Hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan *research question* atau fokus penelitian (Hendarso, 2011). Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja, yang meliputi : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja, yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

Penelitian ini mengambil lokasi di SMA Negeri 4 Singaraja. Lokasi ini dipilih dengan alasan karena sepanjang pengamatan peneliti belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Juga karena data-data yang dibutuhkan cukup tersedia. Selanjutnya teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif dengan prosedur : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan serta verifikasi (Sugiyono, 2013)

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja

Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, Kurikulum Merdeka (yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe) dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik.

Hakekat dari “implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang” (Yasa dan Sandiasa, 2018: 4). Terkait implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja, sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka keberhasilan implementasi kebijakan tersebut akan ditentukan oleh beberapa faktor atau variabel,

dam masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Variabel-variabel tersebut adalah : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.1.1 Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan atau implementor mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan. Pelaksana kebijakan harus menyampaikan kepada kelompok sasaran apa yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya kebijakan tersebut. Terkait dengan implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja, pelaksana program dalam hal ini pelaksana kurikulum merdeka tersebut harus paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ketiga orang informan tersebut yakni Kepala Sekolah, Komite Pembelajaran, dan Guru Penggerak di SMAN 4 Singaraja, dapat diketahui bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan Kurikulum Merdeka, berbagai pihak yang terlibat dalam kurikulum tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mensosialisasikan kepada guru pengajar dan siswa sebagai kelompok sasaran tentang tujuan dan manfaat dari diberlakukannya kurikulum tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III (Subarsono, 2014) bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi yang artinya, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan implementor mengathui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas dan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

3.1.2 Sumberdaya

Implementasi sebuah kebijakan sangat memerlukan adanya sumberdaya yang menjadi pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehebat apapun perencanaan yang dilakukan, semulia apapun tujuan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut, tanpa dukungan sumberdaya yang memadai "sumberdaya manusia yang mumpuni dibidangnya (Sandiasa dan Sudianing, 2021: 36), kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sumberdaya yang dimaksudkan disini adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan melalui proses wawancara, dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMAN 4 Singaraja sangat didukung oleh adanya pelaksana kebijakan yakni Komite Pembelajaran dan Guru Penggerak yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi, serta dana yang memang sudah dialokasikan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III (Subarsono, 2014), bahwa sumberdaya merupakan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja.

3.1.3 Disposisi

Pelaksana kebijakan apalagi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, haruslah dipilih orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu sesama, memiliki kejujuran, serta berlaku adil dan bersifat demokratis. Begitu pula dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang lebih banyak mengadopsi model pembelajaran di negara maju, memerlukan orang-orang dalam hal ini para guru, baik yang bertugas sebagai guru penggerak maupun sebagai komite pembelajaran, yang memiliki komitmen, kejujuran dan kemampuan untuk menyukseskan pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi..

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh para informan , dapat diketahui bahwa terkait Kurikulum Merdeka, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang jujur, memiliki komitmen untuk membantu sesama, bersikap adil dan demokratis serta mau menerima masukan dan saran demi perbaikan pelaksanaan program tersebut kedepannya. Seperti yang disampaikan oleh Edwards III (Subarsono, 2014) tentang disposisi sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika

implementor memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan, yang menyangkut dua hal yakni mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan. Berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja, maka mekanisme pencairan anggaran pelaksanaan proyek pembelajaran serta SOP dalam pelaksanaannya tidaklah terlalu rumit.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh ketiga orang informan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksana Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja berusaha untuk mempermudah proses pelaksanaan proyek-proyek pembelajaran dengan tidak menerapkan prosedur dan struktur birokrasi yang panjang dan rumit, karena semua itu akan mempersulit guru dan peserta didik. Meskipun memang yang namanya struktur birokrasi dengan SOP tersebut memang harus dijalankan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III (Subarsono, 2014) yang mengatakan bahwa struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang panjang dengan SOP yang rumit dan terkesan kaku justru akan melemahkan proses pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja

Berhasil atau gagalnya implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor. Dalam hal ini akan ada faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Terkait dengan implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja, maka ada faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut.

3.2.1 Faktor Pendukung

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja yang pelaksanaannya dimulai di kelas X tahun ajaran 2022/2023 dapat berjalan dengan

baik disebabkan karena adanya beberapa faktor pendukung, baik yang berupa faktor internal maupun faktor eksternal.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ketiga orang informan tersebut di atas, yakni Kepala SMA Negeri 4 Singaraja, Komite Pembelajaran dan guru pengajaran di Kelas X, dapat diketahui bahwa keberadaan SDM yang memadai, dalam hal ini guru-guru yang sudah siap melaksanakan Kurikulum Merdeka, adanya Komite Pembelajaran dan Guru Penggerak menjadi faktor pendukung internal keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja. Hal tersebut juga didukung oleh teknis pelaksanaan kurikulum tersebut yang tidak terlalu sulit dan mudah dipahami. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edward III (Subarsono, 2014) bahwa sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Masmanian dan Sabatier (Subarsono, 2014), bahwa tingkat kesulitan teknis dari masalah kebijakan menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan tersebut, yakni Kepala SMA Negeri 4 Singaraja, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan seorang peserta didik, dapat dipahami bahwa faktor pendukung eksternal keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja adalah tentang kejelasan isi kebijakan, yakni dalam hal ini isi Kurikulum Merdeka yang jelas dan rinci sehingga lebih mudah dalam dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Masmanian dan Sabatier (Subarsono, 2014), yang mengatakan bahwa semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.

3.2.2 Faktor Penghambat

Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang baru diterapkan di SMA Negeri 4 Singaraja, yakni pada tahun ajaran 2022/2023, tentunya akan dijumpai faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan kurikulum tersebut.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan yakni Kepala SMA Negeri 4 Singaraja, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan seorang guru penggerak, dapat diketahui bahwa faktor penghambat implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja diantaranya adalah

masih minimnya kemampuan implementor dalam hal ini guru yang mengajar di kelas X. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh David L. Weimer dan Aidan R. Vining (Subarsono, 2014) yang mengatakan bahwa salah satu variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni kemampuan implementor, dimana keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

4. Penutup

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disampaikan beberapa simpulan yakni :

1. Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Yang menjadi faktor pendukung implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja adalah : ketersediaan sumber daya yang cukup memadai dalam hal ini keberadaan komite pembelajaran dan guru penggerak di SMA Negeri 4 Singaraja. Juga karena isi dari Kurikulum Merdeka tidaklah terlalu sulit untuk diterjemahkan dan diterapkan dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah kemampuan dari implementor dalam hal ini para guru yang mengajar di kelas X yang belum semuanya memahami isi dari kurikulum tersebut, salah satunya dikarenakan mereka belum pernah mengikuti pelatihan tentang Kurikulum Merdeka.

4.2 Saran-saran

Beberapa hal dapat kami sarankan melalui hasil penelitian ini, yaitu :

1. SMA Negeri 4 Singaraja sebagai salah satu SMA favorit di Kabupaten Buleleng, harus bisa memanfaatkan dengan baik semua variabel yang menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka tersebut.
2. Hal-hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka hendaknya dimaksimalkan, sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya diminimalisir dengan cara lebih banyak lagi mengirim para guru untuk mengikuti pelatihan tentang Kurikulum Merdeka

Daftar Pustaka

- Anshari, Hafi, 2014, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Usaha Nasional : Surabaya
- Hendarso, Emy Susanti, 2011, Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed), *Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar*, Kencana Prenada Media : Jakarta
- Ihsan, Fuad, 2016, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta : Jakarta
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022, *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka*, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Ruhimat, Toto, 2014, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Universitas Pendidikan Indonesia : Bandung
- Sandiasa, Gede dan Ni Ketut Sudianing , 2021. “Pelaksanaan Administrasi Dan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Covid 19”. *Dalam Jurnal Widya Publika. Vol.9, No.1 Juni 2021*
- Subarsono, AG. 2014, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Sudirman, AM., 2004, *Posisi, Strategi dan Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Kompetensi (Makalah)*, IKIP Negeri Singaraja
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta : Bandung
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yasa, I Gede Dana dan Gede Sandiasa, 2018. “Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pemberdayaan Masyarakat”. *Dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1 – Pebruari 2018*